



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)
UNIT KERJA : BALAI BESAR POM PALANGKARAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YANI ARDIYANTI
2. Jabatan : PEJABAT ADMINISTRATOR
3. NHK : 406393

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 890.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 95 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 296 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 146.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOBIL, HONDA BRV 1.5 E MT / MPNP MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 92.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 12.040.140**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 1.140.040.140**III. HUTANG** Rp. 477.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 663.040.140

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.